

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Perluasan Ancol untu Masyarakat Mana?

Fraksi Golkar Tegaskan Tolak Reklamasi

SIKAP Partai Golkar, menegaskan menolak reklamasi Ancol. Kendati diajak bersepeda bareng oleh Partai Gerindra di kawasan Ancol, pada Minggu (19/7/2020), partai berlam-bang pohon beringin ini tetap tegas menolak reldamasi perluasan kawasan Ancol.

"Kalau urusan reklamasi perluasan Ancol, sikap partai kami jelas menolak," tegas Ketua DPD Partai Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, di Jakarta, belum lama ini. Menurut Zaki, apa yang diputuskan Fraksi Golkar DPRD DKI dalam menolak reklamasi perluasan Ancol tidak akan luntur meskipun Partai Golkar dirayu banyak pihak.

"Begini, saya pastikan selama reklamasi perluasan Ancol itu belum jelas manfaatnya untuk masyarakat, dukungan Golkar tidak akan pernah keluar," tandas Zaki. Diakuinya, Golkar akan secara detail melihat persoalan reklamasi perluasan Ancol dari mulai regulasi sampai soal segi manfaatnya untuk masyarakat luas.

"Mereka yang mendukung, selalu bilang reklamasi perluasan Ancol ini untuk masyarakat. Ya, masyarakat mana?. Semuanya kan harus dikaji secara cermat dulu, tidak bisa main asal dukung saja," ungkapnya.

Dikatakan, saat ini pihaknya, melalui kadernya di DPRD DKI Jakarta, terus memantau perkembangan langkah Pemprov DKI Jakarta dalam merencanakan reklamasi perluasan Ancol. "Saya selalu intruksikan kepada teman-teman di Fraksi Golkar DPRD DKI, agar selalu kritis terhadap semua kebijakan Gubernur Jakarta yang tidak pro rakyat termasuk soal reklamasi perluasan Ancol ini," jelasnya.

Disinggung kehadirannya dalam acara bersepeda di Kawasan Ancol, Zaki menyatakan hanya diundang. "Bersepeda bareng ini kan kami hanya diundang oleh Gerindra, dan Kebetulan hadir juga tadi

Wagub DKI," ujarnya.

Menurutnya, sepeda bareng yang dilakukan Golkar beserta Gerindra dan Wagub DKI tidak membicarakan politik ataupun soal reklamasi perluasan Ancol. "Di sani hanya olah raga pake sepeda aja. Tidak ada pembicaraan lain-lain," pungkasnya.

Koalisi Sepeda Untuk Jakarta menggelar acara Goes Sepeda Bareng dengan mengambil lokasi di Hotel Putri Duyung Ancol. Acara Goes Sepeda Bareng dihadiri oleh pimpinan partai politik di Jakarta, seperti, Ketua DPD Partai Gerindra. M Taufik, Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar. dan Wagub DKI Ahmad Riza Patria. PDIP dan Demokrat yang juga turut diundang tidak hadir dalam acara.

Pelanggaran Hukum

Sebelumnya Ketua Umum Koalisi Kawali Lingkungan Indonesia Lestari (KAWALI) Puput T.D. Putra angkat bicara soal pemberian izin reldamasi Ancol.

"Pertama, Gubernur Anies Bawesdan mengambil keputusan yang tidak berdasar pertimbangan scientific (keilmuan). Mestinya amdalnya (analisis mengenai dampak lingkungan) didahulukan. Karena dari amdal akan diketahui dampaknya baik, dampak fisik, maupun sosekbudnya," ujar Puput di Jakarta.

Kedua, kata Puput, gubernur telah melakukan perbuatan pembiaran pelanggaran penimbunan material di pantai depan wilayah Jaya Ancol selama ini. "Beliau ini sudah tahu ada sekitar 11 tahun penimbunan material di pantai. pembiaran ini bisa terkena pasal 111 UU 32/2009 (tentang Pencemaran Lingkungan) dengan ancaman hukuman pidana karena penimbunan tersebut tidak ada kajian lingkungannya," ungkapnya.

Ketiga, hasil pengerukan material lumpur baik dari sungai, setu, tanah hasil pengerukan harus dikaji dulu. Karena material itu diindikasikan mengandung unsur B3 (bahan beracun dan berbahaya). "Ini tidak boleh ditimbun disem-

barang tempat seperti di pantai atau laut karena akan mencemari pantai dan laut," ungkapnya.

Keempat, dampak fisik dengan berubahnya garis pantai di depan Taman Impian Jaya Ancol akan menimbulkan dampak negatif pada wilayah samping kanan dan kirinya. Hal itu karena akan terjadi perubahan arus yang akan mengancam kerusakan pantai di kanan kiri lokasi yang direklamasi. "Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan tersebut. Siapa yang akan menanggung biaya kerusakan tersebut," cetusnya.

Kelima, karena belum ada kajian terhadap pengaruh banjir, maka tidak dapat dikatakan reklamasi ini akan mengatasi banjir di Jakarta. (dni)

Saya selalu intruksikan kepada teman-temen di Fraksi Golkar DPRD DKI, agar selalu kritis terhadap semua kebijakan Gubernur Jakarta yang tidak pro rakyat termasuk soal reklamasi perluasan Ancol ini."

Ahmed Zaki Iskandar
Ketua DPD Partai Golkar Jakarta